

ABSTRAK

Kontrak investasi memiliki karakteristik khusus jika dibandingkan dengan kontrak bisnis pada umumnya. Hal ini dikarenakan salah satu pihak dalam kontrak investasi adalah pemerintah yang memiliki personalitas hukum ganda. Pemerintah dapat berfungsi menjadi badan hukum publik yaitu sebagai pembuat peraturan perundang-undangan namun disisi lain juga sebagai badan hukum privat karena kedudukannya sebagai salah satu pihak dalam kontrak investasi. Permasalahan akan timbul ketika Pemerintah mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan kontrak investasi yang telah ditanda-tangani sebelumnya. Implikasi hukum dengan adanya peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah menimbulkan polemik antara kedaulatan negara (*state sovereignty*) dengan prinsip-prinsip hukum kontrak yaitu kewajiban untuk tunduk pada kontrak yang telah dibuat oleh para pihak (*pacta sunt servanda*). Salah satu cara mengatasi hal tersebut adalah dengan mencantumkan *Stabilization Clause* dalam kontrak investasi. Klausula ini mencegah untuk berlakunya undang-undang baru untuk diterapkan dalam kontrak yang telah ditanda tangani sebelumnya.

kata kunci : kontrak investasi, *stabilization clause*, renegotiasi kontrak